

SKRIPSI

ANALISIS AKUN-AKUN YANG MENJADI PARAGRAF PENJELASAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DENGAN PARAGRAF PENJELASAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

SUTARNO NURDIANTO

10873003083

PROGRAM S1

JURUSAN AKUNTANSI (KONSENTRASI AUDITING)

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

ANALISIS AKUN-AKUN YANG MENJADI PARAGRAF PENJELASAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DENGAN PARAGRAF PENJELASAN

Oleh : Sutarno Nurdianto

Didalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akun-akun apa saja yang menjadi paragraf penjelasan dan permasalahan apa saja yang terjadi dalam akun-akun yang menjadi paragraf penjelasan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau pada bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2012. Peneliti menggunakan jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder dengan metode pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data primer berupa data tentang perkembangan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan permasalahannya. Data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010. Peneliti menggunakan analisis deskriptif.

Dari analisis data, diperoleh hasil bahwa permasalahan akun-akun yang menjadi paragraf penjelasan adalah komponen dari Neraca. Akun-akun tersebut meliputi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran (Aset Lancar) dan Akun Dana Bergulir (Investasi Jangka Panjang). Sehingga dari hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan, Akun-Akun Yang Dijelaskan.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Metodologi Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	18
B. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	24
C. Tujuan dari Penyajian Laporan Keuangan Daerah	28
D. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah	30
E. Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan	32
F. Unsur Laporan Keuangan	34

G. Perbedaan Antara Akuntansi Pemerintah Dengan Akuntansi Perusahaan.....	48
H. Kualitas Laporan Keuangan	49
I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.....	50
J. Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	52
K. Asersi Laporan Keuangan	53
L. Jenis Pendapat Auditor.....	54

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

A. Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Provinsi Riau	58
B. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau	59
C. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Akun-Akun yang Menjadi Paragraf Penjelasan.....	67
B. Permasalahan Akun-Akun yang Menjadi Paragraf Penjelasan.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
C. Keterbatasan	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perkembangan Opini Hasil Audit BPK Atas LKPD 2006-2010 Di Wilayah Provinsi Riau	2
Tabel I.2	Neraca Pemerintah Provinsi Riau.....	6
Tabel I.3	Rincian Dana PMEK Tahun 2001 Menurut Data Dari PT Bank Riau Kepri	8
Tabel I.4	Rincian Dana PMEK Tahun 2002 Menurut Data Dari PT Bank Riau Kepri	9
Tabel II.1	Neraca Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Dinas Per 31 Desember 20xx	36
Tabel II.2	Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota/Dinas Per 31 Desember 20xx	45
Tabel III.1	Pembagian Wilayah Di Provinsi Riau	59
Tabel III.2	Susunan Pimpinan Pemerintah Provinsi Riau	61
Tabel III.3	Susunan Pimpinan Dinas/Lembaga/Badan	62
Tabel III.4	Susunan Pimpinan Biro Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau.....	64
Tabel IV.1	Perkembangan Neraca Provinsi Riau Tahun 2008-2010.....	69
Tabel IV.2	Perkembangan Aset Lancar Provinsi Riau Per Tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009	73

Tabel IV.3	Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Provinsi Riau.....	74
Tabel IV.4	Perkembangan Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009	76
Tabel IV.5	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2010 dan 2009.....	79
Tabel IV.6	Neraca Pemerintah Provinsi Riau	83
Tabel IV.7	Rincian Dana PMEK Tahun 2001 Menurut Data Dari PT Bank Riau Kepri	85
Tabel IV.8	Rincian Dana PMEK tahun 2002 Menurut Data Dari PT Bank Riau Kepri	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah (Mahmudi,2007). Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat,2007; Hapsari,2007). Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Bowo,2009).

Untuk melindungi para pengguna laporan keuangan, maka diperlukan pihak ketiga yaitu auditor yang independen dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi,2007). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku institusi pemeriksa atas pengelolaan keuangan negara telah diberi kewenangan berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ada tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Diantara ketiga jenis pemeriksaan tersebut, pemeriksaan keuangan telah

menjadi agenda wajib BPK RI yang sifatnya tahunan atas pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan *auditee*.

Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian *intern* (BPK,2009).

Tabel I.1
Perkembangan Opini Hasil Audit BPK Atas LKPD 2006-2010
Di Wilayah Provinsi Riau

No	Pemda	Opini BPK				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Provinsi Riau	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
2	Kab Indragiri Hulu	TMP	TMP	TMP	TMP	TW
3	Kab Kuantan Singingi	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kab Indragiri Hilir	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
5	Kab Kampar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kab Rokan Hulu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	Kab Pelalawan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kab Bengkalis	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	Kab Siak	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Kab Rokan Hilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
11	Kota Pekanbaru	WDP	WDP	WTP-DPP	WDP	WDP
12	Kota Dumai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kab Kep Meranti	-	-	-	-	WDP

Sumber: *Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Riau*

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

TW : Tidak Wajar (*Advers Opinion*)

TMP : Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Of Opinion*)

Pada Semester I Tahun 2011 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Provinsi Riau. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau pada tanggal 17 Juni 2011 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Riau.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2010 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II, memuat LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Riau tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi

eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Riau, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2010. BPK menilai laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2010 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2010 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan fenomena diatas terlihat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan pada tahun 2010. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih spesifik hal-hal apa saja pada laporan keuangan pemerintah daerah provinsi riau yang menjadi paragraf penjelasan atas pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI, karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas hal ini.

Berdasarkan paragraf penjelasan yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, dapat diketahui akun-akun apa saja yang menjadi penjelasan dalam

laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Selain itu juga dapat ditentukan, permasalahan yang terdapat dalam akun-akun tersebut sehingga laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau memperoleh opini WTP DPP.

Setelah memahami Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan yang menjadi paragraf penjelasan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010, diantaranya :

1. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 31 Desember 2010 sebesar Rp7.402.425.038,00, mengalami kas tekor dari hasil pemeriksaan kas. Gubernur Riau dengan Keputusan Gubernur No. Kpts.710/VI/2011 dan No. Kpts.711/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 menetapkan pembebanan penggantian sementara kepada AJS dan NSD masing-masing sebesar Rp1.304.019.413,00 dan Rp4.634.650.467,00 atau seluruhnya berjumlah Rp5.938.669.880,00. Dengan adanya penetapan pembebanan sementara tersebut, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.938.669.880,00 direklasifikasi ke Aset Lainnya. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.463.755.158,00 belum ditetapkan pembebanan sementara. Selama periode Maret s.d. Mei 2011, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau telah menyetorkan ke Kas daerah sebesar Rp115.850.000,00 sehingga sisa UYHD Tahun 2010 yang belum disetor sebesar Rp1.347.792.910,00.
2. Pemerintah Provinsi Riau mencatat investasi dana bergulir berupa Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) yang digulirkan tahun

2001 dan 2002 sebesar Rp152.806.133.400,00 dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp137.278.469.435,00 sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah sebesar Rp15.527.663.965,00. Dalam menentukan nilai yang dapat direalisasikan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menggunakan data PT Bank Riau Kepri atas jumlah dana yang telah dikembalikan kelompok masyarakat per 31 Desember 2010 sebagai estimasi terbaik ketertagihan dana bergulir tersebut, bukan berdasarkan data penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir untuk menentukan dana bergulir yang benar-benar tidak dapat tertagih, diragukan tertagih, dan dapat ditagih.

Tabel I.2
Neraca Pemerintah Provinsi Riau

Uraian	31 Des 2010	31 Des 2009
Dana Bergulir – PMEK	152.806.133.400,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(137.278.469.435,00)	0,00
Dana Bergulir Neto	15.527.663.965,00	0,00

Sumber: *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan*

Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010

Dana Bergulir berupa Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp152.527.663.965,00 dan Rp 0,00 adalah dana yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 dan 2002 kepada masyarakat atau kelompok masyarakat melalui Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pinjaman Modal (FKPPM) yang dibentuk oleh Gubernur Riau. FKPPM

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan bunga 3% per tahun, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat (bergulir).

Dana PMEK yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2001 dan 2002 masing-masing sebesar Rp52.806.133.400,00 dan Rp100.000.000.000,00.

Dari dana tahun 2001 sebesar Rp52.806.133.400,00, hanya sebesar Rp52.217.512.921 disalurkan FKPPM ke masyarakat sedangkan sisa dana *idle* sebesar Rp588.620.479,00 masih tersimpan di rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (P3M) di PT Bank Riau Kepri.

Dana PMEK sebesar Rp100.000.000.000,00 disalurkan melalui PT Bank Riau Kepri sebesar Rp99.000.000.000,00 dan 4 BPR sebesar Rp1.000.000.000,00.

Rincian dana PMEK menurut data PT Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut :

a) PMEK tahun 2001 sebesar Rp52.806.133.400,00.

Tabel I.3
Rincian Dana PMEK Tahun 2001 Menurut Data Dari PT Bank Riau
Kepri

SKPD Pengelola	Jumlah
1. Dinas Pertanian	9.952.660.000,00
2. Dinas Peternakan	9.335.000.000,00
3. Dinas Perikanan dan Kelautan	14.105.699.900,00
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.129.440.500,00
5. Dinas Perkebunan	16.833.333.000,00
6. Dinas Koperasi dan UKM	750.000.000,00
7. BPPM	700.000.000,00
Jumlah	52.806.133.400,00

Sumber: *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan*

Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010

- b) PMEK di 7 SKPD, 15 BMT dan 4 BPR Tahun 2002 sebesar
Rp100.000.000.000,00

Tabel I.4
Rincian Dana PMEK Tahun 2002 Menurut Data Dari PT Bank Riau
Kepri

Bank/SKPD/Unit Pengelola	Jumlah
PT. Bank Riau Kepri :	
1. Dinas Pertanian	26.460.000.000,00
2. Dinas Peternakan	11.270.000.000,00
3. Dinas Perikanan dan Kelautan	17.640.000.000,00
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.840.000.000,00
5. Dinas Perkebunan	29.400.000.000,00
6. Dinas Koperasi dan UKM	4.900.000.000,00
7. BPPM	490.000.000,00
8. 15 Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang tersebar di Kabupaten/kota	1.000.000.000
Sub Jumlah	99.000.000.000,00
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) :	
1. BPR Sari Madu, Bangkinang	250.000.000,00
2. BPR Indra Arta, Rengat	250.000.000,00
3. BPR Cempaka Wahana Sejahtera, Bagan Batu	250.000.000,00
4. BPR Gemilang, Tembilahan	250.000.000,00
Sub Jumlah	1.000.000.000,00
Jumlah	100.000.000.000,00

Sumber: *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan*

Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010

Berdasarkan data PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2010, jumlah dana yang telah dikembalikan kelompok masyarakat penerima PMEK hanya sebesar Rp15.527.663.965,00. Pemerintah Provinsi Riau menyatakan nilai yang telah tertagih tersebut merupakan estimasi terbaik yang dapat diperkirakan berdasarkan data dan informasi yang ada saat ini. Estimasi ketertagihan Dana Bergulir tersebut akan disesuaikan nilainya setiap tahun.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut : **“ANALISIS AKUN-AKUN YANG MENJADI PARAGRAF PENJELASAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DENGAN PARAGRAF PENJELASAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Akun-akun apa saja yang dijelaskan pada laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau Tahun 2010 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan ?
2. Permasalahan apakah dalam akun-akun yang dijelaskan tersebut yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau Tahun 2010 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis akun-akun yang dijelaskan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau Tahun

2010 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan dalam akun-akun yang dijelaskan tersebut yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau Tahun 2010 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.

- b. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Dapat berguna untuk sumber informasi, bahan pembanding dan dapat menjadi bahan referensi atau tambahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan arena pembinaan laporan keuangan pemerintah daerah dan dalam menetapkan berbagai aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

- c. Peneliti Selanjutnya

Agar dapat menjadi bahan referensi penelitian dimasa yang akan datang.

D. Metodologi Penelitian

1. Design Penelitian

Objek penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif deskriptif. Studi eksploratif dilakukan jika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang dihadapi, atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan di masa lalu (Sekaran,2000). Ini sangat sesuai dengan penelitian ini, karena masih terbatasnya penelitian yang membahas mengenai paragraf penjelasan pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan.

Pada penelitian ini tidak terdapat isu populasi dan sampel, karena pengambilan sampel (*sampling*) merupakan proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakter tersebut pada elemen populasi (Sekaran,2000). Sedangkan penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi karena penelitian ini merupakan studi eksploratif deskriptif yang bertujuan untuk melihat akun-akun apa saja yang jadi paragraf penjelasan pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan

keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan serta permasalahan apa yang terdapat dalam akun-akun tersebut sehingga laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, yang beralamatkan di Jl. Sudirman No. 721 Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan selesai.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendukung penelitian ini diperlukan beberapa jenis data beserta sumbernya, sebagai pedoman peneliti menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:127) bahwa data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data *original*. Data primer penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari auditor badan pemeriksa keuangan dan pihak yang berkepentingan didalamnya dengan mengajukan pertanyaan secara sistematis.

b. Data sekunder

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:127) bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yaitu data yang telah diproses yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan Tahun 2010.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, metode yang digunakan yaitu:

a. Wawancara/*Interview*

Menurut Cholid Narbuko (2009:83) bahwa wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan.

Sedangkan menurut Nasution (2011:127) wawancara berguna sebagai pelengkap metode pengumpulan data lainnya. Jadi, wawancara dapat dilakukan dengan bertatap muka dan berbicara secara langsung dengan auditor badan pemeriksa keuangan yang memeriksa dan memberikan opini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data

Menurut Uma Sekaran (2006:175) bahwa analisis data merupakan tahap untuk menemukan permasalahan yang mungkin terdapat didalam data tersebut setelah data berhasil dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif. Menurut Rahimsyah (2009:120) menyatakan dalam kamus Bahasa Indonesia bahwa analisis deskriptif yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang sesuatu sesuai kenyataan yang ada. Sehingga dengan analisis deskriptif ini dapat dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi data, selanjutnya menganalisis tata cara serta penyajian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2010.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam sistematika penulisan penelitian ini, penulis membaginya dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian yaitu akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, tujuan dari penyajian laporan keuangan daerah, sistem pencatatan dan dasar pengakuan akuntansi keuangan daerah, karakteristik kualitatif laporan keuangan, unsur laporan keuangan, perbedaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi perusahaan, kualitas laporan keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan, audit laporan keuangan pemerintah daerah, asersi laporan keuangan, dan jenis-jenis pendapat auditor.

Bab III : Gambaran Umum Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Pada bab ini membahas mengenai sejarah singkat Pemerintah Daerah Provinsi Riau, visi dan misi serta struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang analisis akun-akun yang menjadi paragraf penjelasan dan permasalahan akun-akun yang menjadi paragraf penjelasan.

Bab V : Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dan saran-saran serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, laporan keuangan yang disusun harus dapat menyajikan laporan yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik *intern* maupun *ekstern*. Fenomena yang sekarang muncul adalah adanya tuntutan transparansi yang mencerminkan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, terutama pemerintah.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. Saat ini, secara garis besar Standar Akuntansi Keuangan berisi 59 PSAK beserta kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mendasarinya. Standar Keuangan yang ditetapkan oleh IAI merupakan hasil adaptasi dari *International Accounting Standard*.

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi sering disebut dengan “bahasa bisnis” karna akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan bagi pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi sebuah perusahaan. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau lebih dikenal dengan istilah laporan keuangan.

American institute of certified publik accounting (AICPA) dalam Sofyan Syafri Harahap (2005:4) mendefenisikan akuntansi dengan pengertian sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Abdul Halim (2002:6) memberikan defenisi akuntansi yang diterjemahkan sebagai :

“Akuntansi adalah suatu aktifitas jasa. Fungsinya adalah penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang satuan-satuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif”.

Menurut *Langenderfer* dalam Mardiasmo (2002:160) mendefenisikan akuntansi dengan pengertian sebagai berikut :

“Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat didefenisikan sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi dapat diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi digunakan untuk mencatat, mengikhtisarkan dan

melaporkan transaksi-transaksi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

a. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana perusahaan yang tergolong sebagai lembaga mikro. Sehingga akuntansi pemerintah sebagaimana akuntansi perusahaan, digolongkan pula sebagai akuntansi mikro.

Akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Indra Bastian,2005:15).

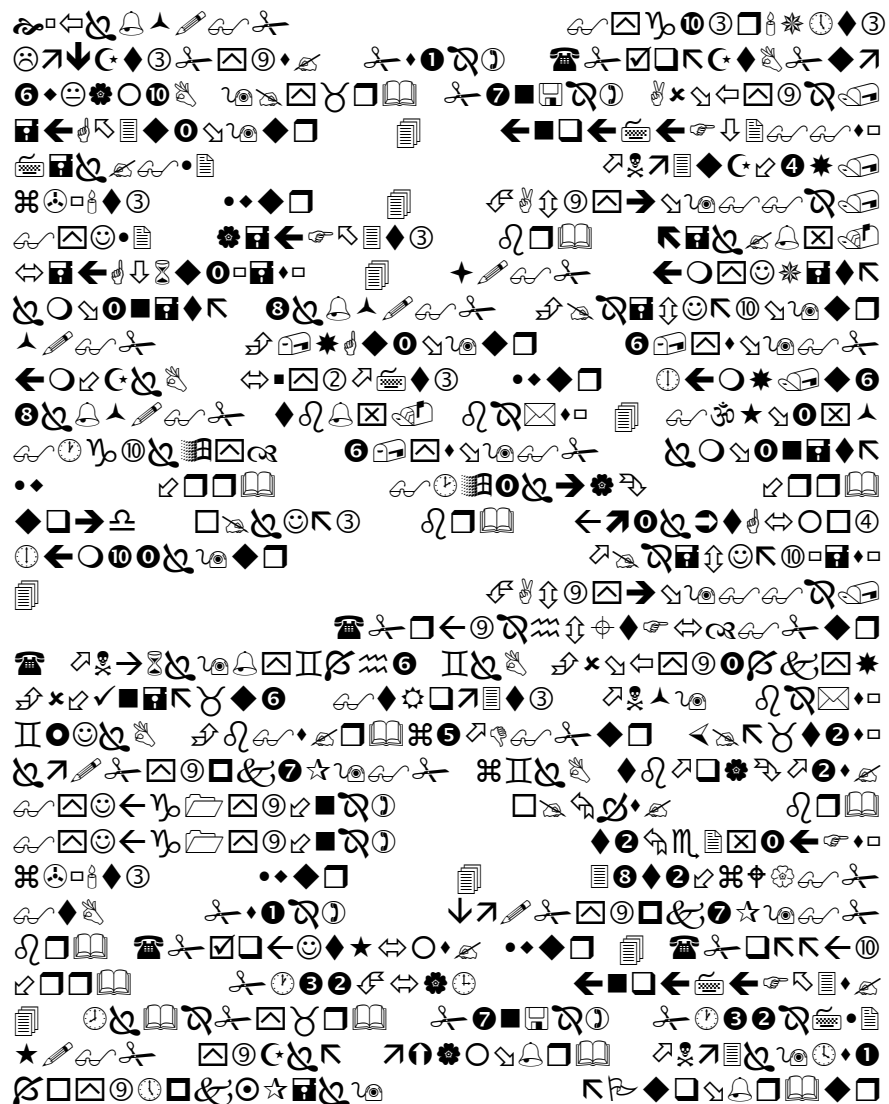
b. Pengertian Akuntansi Menurut Syariah

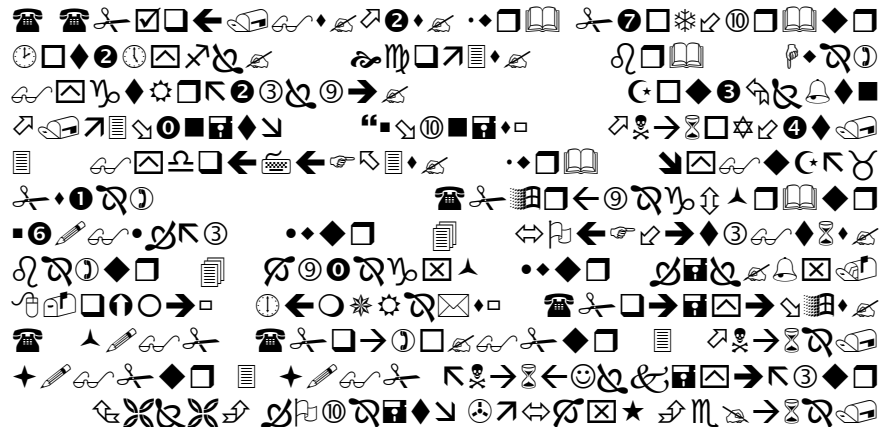
Suatu pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi lain yang menyangkut penyusunan berbagai laporan periodik dari catatan tersebut sesuai dengan syariat islam. Laporan-laporan itu yang sifatnya umum ataupun khusus memberikan informasi yang berguna kepada para manajer, pemilik kreditur ataupun debitur, lembaga pemerintah dan masyarakat umum. Yang penting adalah setiap pencatatan

tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah (berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist) serta prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Akuntansi dalam perspektif islam juga berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban (Rifki Muhammad,2008:10).

Akuntansi menurut perspektif islam (syariah) dalam melakukan pencatatan urusan yang diterangkan dalam surah Al Baqarah ayat 282 :





Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian). Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah; 282).

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah.

2. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan Istilah “laporan keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut.

Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. PSAK mendorong penggunaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan khusus apabila diperlukan.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat memberi informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ini dapat berasal dari dalam (*internal*) maupun luar (*eksternal*) perusahaan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Disamping sebagai sumber informasi bagi manajemen, pemilik perusahaan maupun pihak lain yang berkepentingan, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen juga berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban (*Accountability*) pada akhir suatu periode.

Laporan keuangan dibuat pada waktu-waktu tertentu untuk menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan laba rugi operasi dalam suatu periode tertentu. Periode yang dalam definisi tersebut dapat

untuk masa satu bulan, satu kwartal, satu semester, satu tahun atau untuk masa jangka waktu yang lain.

Menurut Belkaoui (2002:10), laporan keuangan merupakan suatu ikhtisar keuangan yang menyediakan informasi yang mendasari keputusan ekonomi. Maksudnya adalah adanya hubungan langsung suatu relevansi informasi akuntansi dan alokasi sumber daya secara efisien.

Laporan keuangan merupakan laporan yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan seperti pihak manajemen, investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan lainnya. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban untuk digunakan sebagai indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan.

B. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Arifin Sabeni (2001:105) sistem akuntansi suatu lembaga pemerintahan harus :

- a. Menunjukkan bahwa semua ketentuan hukum dan perundang-undangan telah dipenuhi.
- b. Menentukan secara wajar dan dengan pengungkapan yang selengkapnyanya atas posisi keuangan dan hasil operasi dana.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksud sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut adalah prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan pemerintah :

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan anggaran akrual untuk pengungkapan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas dalam laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum daerah atau oleh entitas pelapor dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelapor. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Nilai Historis (*Historial Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada

saat diperoleh. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis akan lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain, karna nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, ini bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pelaporan entitas perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulan, semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan oleh pemerintah pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelapor (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa periode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan

diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan yang sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenalkan, misalnya: pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak menjadi netral dan tidak andal.

C. Tujuan dari Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan APB statement No. 4 (AICPA) tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan posisi laporan keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan, dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan.

Secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang berguna dalam bantuan keputusan ekonomi sosial, politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban (*Accountability*) dan pengolahan (*Stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja managerial dan organisasi.

Secara khusus tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah menurut Abdul Halim Tanjung (2004:26) adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumberdaya finansial jangka pendek unit pemerintahan.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasi.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja managerial dan organisasional :
 - a. Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktifitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria

yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan unit pemerintah lain.

- b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktifitas dan fungsi tertentu dalam unit pemerintahan.
- c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktifitas, dan fungsi serta efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
- d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*Equity*).

D. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

1. Sistem Pencatatan

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Yang dimaksud dengan pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.

Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktifitas yang berhubungan dengan uang. Oleh karena itu semua transaksi akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengelolaan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan atau pengurangan oleh sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi. Untuk

mengatur hal tersebut pemerintah juga membuat ketentuan dalam bentuk SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (SAP No. 24 tahun 2005).

Ada beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem pencatatan tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada posisi pengeluaran.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debet dan kredit. Setiap pencatatan menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan/bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran (Abdul Halim,2002:37).

2. Dasar Pengakuan

Pengakuan adalah proses untuk secara formal mencatat atau memasukkan suatu pos dalam akun dan laporan keuangan entitas (Donald E. Kieso, 2002:3). Dasar pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi.

Menurut Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dasar akuntansi terbagi empat yaitu:

1) Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menetapkan pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi itu tidak dicatat.

2) Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

3) Basis Kas Modifikasi (*Modified Cash Basis*)

Basis kas modifikasian mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran, dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4) Basis Akrual Modifikasian (*Modified Accrual Basis*)

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

E. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Selain menggunakan asumsi dasar, laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa

lalu. Dengan demikian laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*)
- c. Tepat waktu dan lengkap

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- a. Penyajian Jujur
- b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)
- c. Netralitas

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menetapkan kebijakan yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna disesuaikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelapor, serta adanya kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

F. Unsur Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh pelaporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, Pernyataan No. 1 Paragraf 33).

2. Laporan Posisi Keuangan/ Neraca

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf 38 dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu, dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang

menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut potret posisi keuangan suatu entitas.

Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Lampiran IIIB tentang penyajian neraca Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah sebagai berikut :

Tabel II. 1
Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Dinas
NERACA
Per 31 Desember 20xx

No	Uraian	20xx+1	20xx
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Daerah	xxx	Xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	Xxx
6	Ivestasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
7	Piutang Pajak	xxx	Xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	Xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negeri	xxx	Xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	Xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	xxx	Xxx

12	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	Xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	Xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	Xxx
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	Xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	Xxx
17	Persediaan	xxx	Xxx
18	Jumlah Aset Lancar (3-17)	xxx	Xxx
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Non Permanen		
21	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	Xxx
22	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	Xxx
23	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	Xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	Xxx
25	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	xxx	Xxx
26	Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	Xxx
27	Jumlah Investasi Non Permanen (21-26)	xxx	Xxx
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investas Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	Jumlah Investasi Permanen (29-30)	xxxx	xxxx
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27+31)	xxx	xxx
33	ASET TETAP		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi penyusutan	xxx	xxx
41	Jumlah Aset Tetap (34-40)	xxx	xxx
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan	xxx	xxx
44	Jumlah Dana Cadangan (43)	xxx	xxx
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
47	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lainnya	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (46-51)	xxx	xxx
53	Jumlah Aset (18+32+41+44+52)	xxxx	xxxx

54	KEWAJIBAN		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx	xxx
57	Utang Bunga	xxx	xxx
58	Bagian Lancar dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx
59	Bagian Lancar Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
60	Bagian lancar Dalam Negeri-Pemerintah Daerah lainnya	xxx	xxx
61	Bagian lancar dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
62	Bagian Lancar Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx
63	Bagian lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56-65)	xxx	xxx
66	Kewajiban Jangka Panjang		
67	Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx
68	Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
71	Utang Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
73	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67-72)	xxx	xxx
74	Jumlah Kewajiban (65+73)	xxx	xxx
75	EKUITAS DANA		
76	EKUITAS DANA LANCAR		
77	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
78	Pendapatan Yang Ditangguhkan	xxx	xxx
79	Cadangan Piutang	xxx	xxx
80	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
81	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	xxx	xxx
82	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (77-81)	xxx	xxx
83	EKUITAS DANA INVESTASI		
84	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
85	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
86	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
87	Dana yang Harus Disediakan untuk	xxx	xxx

	Pembayaran Utang Jangka Panjang		
88	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (84-87)	xxx	xxx
89	EKUITAS DANA CADANGAN		
90	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
91	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (90)	xxx	xxx
92	JUMLAH EKUITAS DANA (82+88+91)	xxx	xxx
93	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana (74+92)	xxxx	xxxx

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005

a. Aktiva (Aset)

Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karna alasan sejarah dan budaya.

Aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas dan setara kas

Aset lancar yang dimaksud diatas meliputi :

1) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang

belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal masuk kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal awal neraca. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehanya.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi pemerintah yang segera dapat dikonversi menjadi kas disebut dengan investasi jangka pendek. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai dengan 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek diakui pada saat kepemilikan terjadi yakni pada saat menerima bukti investasi. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai yang tertera pada sertifikat (bukti investasi). Penatausahaan dan pencatatan investasi jangka pendek dilakukan oleh kementerian keuangan.

3) Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, dan Piutang Lainnya.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan (SAP No. 24 Tahun 2005).

5) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, biasanya aset tetap terdiri dari :

1. Tanah

2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jalan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, metode penyusutan aset tetap yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai masing-masing periode diakui sebagai pengurang tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

b. Kewajiban (*Liabilitas*)

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban timbul umumnya karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Praktek yang terjadi selama ini, pada umumnya kewajiban yang dicatat dalam pembukuan pemerintah hanya utang yang berasal dari pinjaman. Oleh karena itu untuk bisa menyajikan secara lengkap seluruh utang yang dimilikinya, pada saat penyusunan neraca pertama kali pemerintah harus

dilaksanakan kegiatan inventarisasi atas seluruh utang yang ada pada tanggal neraca tersebut.

Penyajian utang pemerintah di neraca diklarifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah. Utang dicatat sebesar nilai nominal, pada setiap tanggal neraca, utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintahan yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos ekuitas dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset dengan kewajiban jangka pendek/lancar. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

3. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan perundang-undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah arus masuk, arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum daerah. Penyajian laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran (Abdul Hafiz Tanjung, 2006:196).

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang

memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktifitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Dalam laporan arus kas, yang dimaksud kas tidak hanya terbatas pada kas itu sendiri, tetapi juga mencakup investasi jangka pendek yang sangat likuid. Dengan demikian istilah kas dalam laporan arus kas ini adalah uang tunai dan setara kas. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Investasi baru memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Dengan demikian investasi dalam bentuk saham tidak termasuk dalam setara kas, kecuali substansinya setara kas.

Tabel II.2
Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Dinas
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 20xx

Uraian	Jumlah	
	200X+1	200X
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
I Arus Masuk Kas		
A. Pendapatan Asli Daerah		
1. Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx
2. Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx
3. Pendapatan dari Bagian Laba BUMD	xxx	xxx
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx
Sub Jumlah	xxxx	xxxx
B. Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah		

Pusat		
1. Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
2. Pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak	xxx	xxx
3. Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
4. Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
5. Dana Perimbangan dari Provinsi	xxx	xxx
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	xxx	xxx
Sub Jumlah	xxxx	xxxx
 C. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
1. Dana Penyeimbang/Dana Konfinjensi	xxx	xxx
2. Dana Penanggulangan Prasarana Perkotaan	xxx	xxx
Sub Jumlah	xxxx	xxxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxxx	xxxx
 II Arus Keluar Kas		
1 Belanja Pegawai	xxx	xxx
2 Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx
3 Belanja Pemeliharaan	xxx	xxx
4 Belanja Perjalanan Dinas	xxx	xxx
5 Belanja Pinjaman	xxx	xxx
6 Belanja Operasi lainnya	xxx	xxx
7 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	xxx	xxx
8 Belanja Tak Tersangka	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxxx	xxxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	xxxx	xxxx
 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
I Arus Masuk Kas		
1 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxxx	xxxx
 II Arus Keluar Kas		
1. Pembelian Aset Tetap dan Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
2. Pembelian Persediaan	xxx	xxx
3. Pembelian Aset tak Berwujud	xxx	xxx
4. Transfer ke Lain-Lain Aset	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxxx	xxxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	xxxx	xxxx

Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan		
I Arus Masuk Kas	xxx	xxx
1. Penerimaan Hutang Pihak Ketiga	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas		
II Arus Keluar Kas	xxx	xxx
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
2. Pembayaran Hutang Pokok kepada Bank	xxx	xxx
3. Pembayaran Hutang Pokok kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxxx	xxxx
Arus Kas Beralih dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran		
I Arus Masuk Kas	xxx	xxx
1. Penerimaan Atas Penerusan Pinjaman	xxx	xxx
2. Penerimaan Penyelesaian Piutang Panjar Dinas-		
Dinas	xxx	xxx
3. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	xxxx	xxxx
Jumlah Arus Masuk Kas		
II Arus Keluar Kas	xxx	xxx
1. Pembayaran kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
2. Pengeluaran Penyelesaian Piutang Panjar Dinas-		
Dinas	xxx	xxx
3. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	xxxx	xxxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxxx	xxxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	xxxx	xxxx
Kenaikan/Penurunan Kas	xxxx	xxxx
Saldo Awal Kas	xxxx	xxxx
Saldo Akhir Kas		

Sumber: (Ihyaul Ulum M.D, 2009)

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Untuk tujuan umum, setiap arus kas harus

memiliki referensi silang dalam catatan atas laporan keuangan (Abdul Hafiz Tanjung,2006:206).

Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan dapat dipahami oleh pembaca secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah.

G. Perbedaan Antara Akuntansi Pemerintahan Dengan Akuntansi Perusahaan

Akuntansi Pemerintah :

- a. Tidak terdapat laporan laba rugi sebagai bagian laporan keuangan, tetapi tetap ada laporan hasil operasi.
- b. Terdapat perkiraan anggaran sehingga ada jurnal untuk anggaran yang telah disetujui.
- c. Menggunakan akuntansi dana dan berbagai jenis dana dapat digunakan.
- d. Pengeluaran modal dilaporkan baik dalam laporan neraca, maupun dalam laporan operasional.

- e. Sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah.
- f. Perkiraan “modal” diganti “saldo dana”.

Akuntansi Perusahaan :

- a. Menghasilkan laporan laba rugi sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan.
- b. Tidak ada perkiraan anggaran (*non budgetary accounting*) sehingga tidak ada jurnal untuk anggaran.
- c. Semua aset, kewajiban dan ekuitas merupakan dari satu dana.
- d. Pengeluaran modal hanya dilaporkan dana neraca
- e. Tidak terlalu dipengaruhi peraturan pemerintah.
- f. Ada perkiraan modal (Bahtiar Arif,2002:8).

H. Kualitas Laporan Keuangan

Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat,2007; Hapsari,2007). Atril dan McLaney (dalam Saidin,2007) menyebutkan kriteria yang harus dimiliki oleh pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu dan biaya/manfaat. Ditegaskan bahwa relevan dan dapat diandalkan dari pelaporan keuangan dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat, namun jika laporan keuangan tidak dapat dibandingkan, tidak dapat dimengerti

dan tidak tepat waktu, biaya yang lebih besar dari manfaat maka akan mengurangi manfaatnya.

Pembuatan laporan keuangan di sektor pemerintahan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Informasi akuntansi dapat digunakan dalam mengawasi dan menjalankan kontrak politik, ekonomi dan sosial (Chan,2003).Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo dan Tomasi,1999 dalam Mardiasmo,2006).

Agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada saat ini, pemerintah di Indonesia sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP Nomor 24 tahun 2005). Di dalamnya terdapat Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang memuat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif itu dapat diartikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Saidin (2007) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada sektor swasta adalah mekanisme pengawasan perusahaan. Hal serupa juga dinyatakan oleh Bawhede (2001) dimana faktor potensial yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan adalah kualitas dari mekanisme tata kelola eksternal perusahaan (seperti: kualitas audit), dan mekanisme tata kelola internal perusahaan (seperti: kualitas dewan direksi). Selain itu keputusan manajemen dan regulasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, mekanisme tatakelola internal dan eksternal perusahaan juga akan mempengaruhi pelaporan keuangan.

Penilaian kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah yang ada. Oleh karena itu, salah satu topik menarik dalam akuntansi pemerintahan adalah berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan itu sendiri. Menurut Chan (2003) dari perspektif riset, teori yang mendasari standar akuntansi pemerintahan sebagian besar bersifat normatif berbeda dengan pengembangan teori akuntansi positif pada sektor swasta. Selanjutnya, Sutcliffe (2003) mengatakan bahwa dari berbagai perubahan yang terjadi di akuntansi pemerintahan beberapa tahun terakhir, lahirnya *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) merupakan perubahan yang paling penting. Namun ternyata, IPSAS menyerupai standar akuntansi bisnis yang disusun oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). Dimana ketentuan teknisnya dirancang oleh akuntan untuk akuntan, bukan untuk pembuat aturan publik yang akan sangat menentukan kesuksesan implementasi IPSAS tersebut. Akibatnya,

IPSAS memiliki beberapa nilai simbolik. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carpenter dan Feroz (1992) yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*general accepted accounting principles*) hanyalah sebagai simbol legalitas saja di New York.

Di Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP sendiri merupakan salah satu kompartemen yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. Jadi dapat dikatakan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia. Namun, regulasi akuntansi pemerintahan di Indonesia menggunakan referensi internasional *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) dengan memperhatikan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

J. Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jones dan Pendlebury (2000) menyatakan bahwa institusi yang mengelola dan menjalankan audit sektor publik berbeda dengan sektor swasta, hal ini disebabkan oleh pengaruh dari undang-undang tertentu. Perbedaan disebabkan karena latar belakang institusi dan hukum menjadikan audit sektor publik memiliki prosedur, tanggung jawab dan peran yang lebih luas dibandingkan sektor swasta (Jones dan Pendlebury, 2000). Di *United States* ini dikenal dengan “*expanded scope audit*” sedangkan di Kanada disebut “*comprehensive auditing*”.

Audit sektor publik yang lebih luas dari perundang-undangan audit untuk sektor swasta dapat dilihat dengan adanya audit kepatuhan, audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas yang memiliki ketentuan yang jelas selain attestasi atas laporan keuangan (Jones dan Pendlebury,2000).

Di Indonesia, pemeriksaan menurut amanat UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara meliputi tiga jenis yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Representasi kewajaran kemudian dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas pengendalian intern (BPK,2009).

Sesuai dengan Pasal 23 UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah auditor eksternal yang merupakan lembaga pemeriksa independen.

K. Asersi Laporan Keuangan

Asersi merupakan representasi pihak manajemen yang terdapat dalam laporan keuangan, yang meliputi pernyataan mengenai posisi keuangan dan kegiatan operasi organisasi. Kategori-kategori asersi adalah sebagai berikut :

- a. Keberadaan (*Eksistensi*)
- b. Kelengkapan
- c. Hak dan Kewajiban
- d. Penilaian dan Alokasi
- e. Penyajian dan Pengungkapan

Auditor perlu untuk mengungkapkan peristiwa kemudian yang mendukung masing-masing asersi untuk seluruh komponen laporan keuangan yang bersifat material. Suatu komponen laporan keuangan mungkin dapat berupa rekening neraca, atau suatu kelompok transaksi, dan kategori-kategori asersi secara luas meliputi transaksi dan neraca (Indra Bastian,2003).

L. Jenis Pendapat Auditor

Indra Bastian menyatakan bahwa ada lima jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu :

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)
- b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas
- c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)
- d. Pendapat tidak wajar (*Advers Opinion*)
- e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Of Opinion atau No Opinion*)

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Tambahan Bahasa Penjelas

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelas.

Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelas tambahan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.

Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf pengantar untuk menegaskan pemisahan tanggung jawab dalam pelaksanaan audit.

- b. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh profesi atau pihak yang berwenang.

Penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang terpaksa dilakukan agar tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan auditan. Auditor harus

menjelaskan penyimpangan yang dilakukan berikut taksiran pengaruh maupun alasannya penyimpangan dilakukan dalam satu paragraf khusus.

- c. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material.
- d. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- e. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi.

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian

Pendapat ini diberikan apabila :

- a. Tidak ada bukti yang kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan,
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.

4. Pendapat Tidak Wajar

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat diberikan terhadap laporan keuangan. Penjelasan tersebut harus dinyatakan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Pernyataan auditor tidak memberikan pendapat ini layak diberikan apabila :

- a. Ada lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu.
- b. Auditor tidak independen terhadap klien.

Pernyataan ini tidak dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor tidak diperkenankan mencantumkan paragraf lingkup audit apabila ia menyatakan untuk tidak memberikan pendapat. Ia harus menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dalam satu paragraf khusus sebelum paragraf penjelasan.

BAB III
GAMBARAN UMUM
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

A. Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yang kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646).

Provinsi Riau memiliki luas 88.672.67 km² dengan persentase luas daratan sebesar 80,11% dan lautan/perairan seluas 19,89%. Daerah Provinsi Riau pada umumnya beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Pada Tahun 2010, jumlah penduduk Riau berjumlah 5.543.031 jiwa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten/kota dengan 151 kecamatan dan 1.662 kelurahan/desa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1
Pembagian Wilayah Di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Kec	Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah (Km)
1	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	12	209	520.216,13
2	Indragiri Hulu	Rengat	14	194	767.626,13
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	20	193	1.379.837,12
4	Palalawan	Pangkalan Kerinci	12	118	1.240.413,95
5	Siak	Siak Sri Indrapura	14	113	823.357,000
6	Kampar	Bangkinag	20	245	1.092.819,71
7	Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	16	151	722.977,68
8	Bengkalis	Bengkalis	8	100	1.200.715,21
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-API	13	134	896.142,93
10	Kep. Meranti	Selat Panjang	5	75	3.707,84
11	Pekanbaru	Pekanbaru	12	58	63.300,86
12	Dumai	Dumai	5	32	203.900,00
Jumlah			151	1.622	8.915.015,09

Sumber: *BPS Riau*

B. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Untuk dapat mewujudkan masyarakat Riau yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi baik secara lokal, nasional dan regional serta dilandasi dengan nilai-nilai hakiki kebudayaan Melayu yang beradab, bermoral dan tangguh menghadapi era globalisasi dan modernisasi yang pada akhirnya menjadikan masyarakat Riau maju dan mandiri, sejahtera lahir dan bathin dan beradat istiadat Melayu yang agamis, maka disusunlah Visi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No. 36 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi yakni :

“Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Dan Bathin, Di Asia Tenggara Tahun 2020”.

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Riau 2020, maka ke depan Misi Pembangunan Riau yang dilaksanakan bertumpu pada komitmen yang tertuang sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan profesional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat.
- b. Mewujudkan Supremasi hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia.
- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat.
- d. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis.
- f. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama, seni budaya dan moral.
- g. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan publik.
- h. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.

- i. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya, sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada.
- j. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

C. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 460, Pekanbaru. Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Daerah serta dinas/lembaga/badan yang terkait dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2010, dan 2009, susunan Gubernur, Wakil Gubernur dan pimpinan Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Susunan Pimpinan Pemerintah Provinsi Riau

	2010	2009
Gubernur	H.M. Rusli Zainal	H.M. Rusli Zainal
Wakil Gubernur	H.R. Mambang MIT	H.R. Mambang MIT
Sekretaris Daerah	Wan Syamsir Yus	Wan Syamsir Yus

Sumber: *BPS Riau*

Tabel III.3
Susunan Pimpinan Dinas/Lembaga/Badan

NO	INSTANSI	PIMPINAN	ALAMAT
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Drs. Wan Syamsir Yus	Jl. Jend. Sudirman No. 460
2.	Inspektorat Provinsi Riau	Syamsurizal	Jl. Cut Nyak Dien
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Drs.H.M. Ramli Walid, Msi	Jl. Gajah Mada
4.	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau	Prof. Dr. Ir. T. Dahril, M.Sc	Jl. Diponegoro No. 24 A
5.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau	Daswanto	Jl. Cut Nyak Dien
6.	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau	Akmal JS	Jl. Thamrin No. 93
7.	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau	Mulkan Syarif	Jl. Kuantan Raya No. 27
8.	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau	Adizar	Jl. Gajah Mada No. 200
9.	Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau	Rizka Utama	Jl. Jend. Sudirman No. 462
10.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau	Abd. Lafiz, SH, M.Si	Jl. H.R. Subrantas Panam
11.	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Wirdaningsih	Jl. Pepaya No. (Kantor Dinas Koperasi dan UKM Lama)
12.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Zaini Ismail	Jl. Cut Nyak Dien No. Pekanbaru
13.	Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau	Zailani Arifsyah	Jl. Kaharuddin Nasution No. 339
14.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau	Alimuddin	Jl. Jendral Sudirman
15.	Badan Penghubung Provinsi Riau	Tarmizi Natar Nasution	Jl. Otto Iskandardinata No. 107
16.	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Ernawati Balia	Jl. Diponegoro No. 2
17.	RSJ Tampan Provinsi Riau	Ruspian	Jl. H.R. Subrantas Panam
18.	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Drs. H.M. Wardan, MP	Jl. Cut Nyak Dien
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau	Ir. Lukman Abbas, MT	Jl. Dr. Sutomo No. 114
20.	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	H. Katijo Sempono, S.IP, M.Kes	Jl. Cut Nyak Dien
21.	Dinas Sosial Provinsi Riau	Saqlul Said Amri	Jl. Jend. Sudirman No. 239

22.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau	Nazaruddin	Jl. Jend. Sudirman No. 438
23.	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	Surya Maulana	Jl. Jend. Sudirman No. 474
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau	Said Syarifuddin	Jl. Jend. Sudirman No. 200
25.	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	SF. Hariyanto	Jl. Riau
26.	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau	Drs. R. Indra Bangwasan	Jl. Pepaya No. 67
27.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau	Edi Sudawanto	Jl. Pepaya No. 63
28.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau	Ir. Basriman, MP	Jl. H.R. Subrantas No. 4 Panam
29.	Dinas Peternakan Provinsi Riau	drh. Askardiya Ribudana Patrianov	Jl. Patimura No. 2
30.	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau	Prof. DR. Ir. Irwan Effendi, M.Sc	Jl. Patimura No. 6
31.	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Zulher	Jl. Cut Nyak Dien
32.	Dinas Kehutanan Provinsi Riau	Zulkifli Yusuf, SH	Jl. Jend. Sudirman No. 468
33.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau	Husni Hasan	Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga
34.	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau	Drs. Said Mukri	Jl. Jend. Sudirman No. 6
35.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau	Drs.H. Ahmad Syah Harroffie	Jl. Jend. Sudirman No. 460
36.	Sekretaris DPRD Provinsi Riau	Zulkarnain Kadir	Jl. Jend. Sudirman
37.	Satuan Polisi Pamong Praja	Nizamul	Jl. Letkol Hasan Basri No. 04
38.	Korpri Provinsi Riau	Muchtar Amin	Jl. Diponegoro / Petala Bumi

Sumber: *BPS Riau*

Tabel III.4
Susunan Pimpinan Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Riau

NO	NAMA BIRO	PIMPINAN
1.	Biro Tata Pemerintahan	M Guntur
2.	Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	H. Kasiarudin, SH
3.	Biro Hubungan Masyarakat	Drs. Chairul Rizki, MP
4.	Biro Administrasi Pembangunan	Lisda Erni
5.	Biro Administrasi Perekonomian	H. Irhas Irvan, SH MSi
6.	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Edi Satria
7.	Biro Umum	Rusli M
8.	Biro Keuangan	Hardy, SE, AK
9.	Biro Perlengkapan	Abdi Haro

Sumber: *BPS Riau*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum pemeriksaan yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan .

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010 adalah untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*).
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2010 meliputi pengujian atas :

- a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya.
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan SAP.
- d. Penyajian saldo akun-akun dalam Neraca per 31 Desember 2010.
- e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (*asersi management*) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. Keberadaan dan keterjadian

Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2010 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA Tahun Anggaran 2010 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

- b. Kelengkapan

Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2010 telah dicatat dalam LRA.

- c. Hak dan Kewajiban

Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

d. Penilaian dan Alokasi

Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan dan merupakan alokasi biaya/anggaran Tahun Anggaran 2010.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A. Analisis Akun-Akun Yang Menjadi Paragraf Penjelasan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dengan tetap mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan konsep nilai historis,

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau meliputi rekening rekening Entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Provinsi Riau.

Laporan pemerintah Provinsi Riau tidak mengkonsolidasikan rekening-rekening yang merupakan entitas yang merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Riau yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah dan entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun 2010, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2010. Adapun akun-akun yang menjadi paragraf penjelasan adalah komponen dari Neraca. Akun-akun tersebut meliputi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran (Aset Lancar) dan Akun Dana Bergulir (Investasi Jangka Panjang).

1. Neraca

Neraca merupakan salah satu bagian terpenting dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu yang dalam hal ini memuatkan posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pemerintah Provinsi Riau per tanggal 31 Desember 2010.

Tabel IV.1
Perkembangan Neraca Provinsi Riau Tahun 2008-2010

Uraian	2008	2009	2010
Aset	16.417.041.078.244,10	16.926.364.142.206,50	18.909.603.793.790,20
Aset Lancar	909.799.235.451,50	174.545.680.022,50	447.490.014.206,20
Investasi Jangka Panjang	834.805.295.253,99	899.465.063.646,75	913.478.004.136,02
Aset Tetap	14.446.596.346.399,10	15.472.925.480.274,20	16.945.931.759.299,60
Dana Cadangan	203.576.912.293,00	310.767.880.386,00	434.922.507.963,00
Aset Lainnya	22.263.288.846,46	68.660.037.876,96	167.781.508.185,36
Kewajiban	16.689.498.934,00	96.722.107.938,54	276.214.424.666,50
Kewajiban Jangka Pendek	16.689.498.934,00	96.722.107.938,54	276.214.424.666,50
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Ekuitas Dana	16.400.351.579.310,00	16.829.642.034.267,90	18.633.389.369.123,70
Ekuitas Dana Lancar	893.109.736.517,50	77.823.572.083,96	171.275.589.539,70
Ekuitas Dana Investasi	15.303.664.930.499,50	16.441.050.581.798,00	18.027.191.271.621,00
Ekuitas Dana Cadangan	203.576.912.293,00	310.767.880.386,00	434.922.507.963,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	16.417.041.078.244,00	16.926.364.142.206,50	18.909.603.793.790,20

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2008-2010

a) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Di dalam neraca Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2010 yang menjadi bagian dari aset adalah aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar yang termuat dalam neraca Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2010 adalah Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD, Kas di Bendahara Penerimaan BLUD, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Piutang Lain-Lain dan Persediaan.

Kas mencakup Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD dan BLUD, dan Kas di Bendahara Penerimaan SKPD dan BLUD. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD), terdiri dari:

- Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

- Setara kas, antara lain surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola BUD.
- Uang tunai (uang kertas dan logam) di BUD.

Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak (PPH dan PPN), Iuran Bapeltarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke Kas Negara dan pihak ketiga penerima. PFK tersebut diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

Kas yang di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

Piutang sebagai hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, meliputi piutang pajak dan retribusi daerah, piutang bagi hasil provinsi, bagian lancar dari tagihan penjualan secara

angsuran/pinjaman kepada BUMD/bagian lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang pajak dan retribusi daerah diakui sebesar Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu yang telah diterbitkan, namun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak/retribusi, dan piutang lainnya.

Piutang bagi hasil pajak provinsi merupakan hak pemerintah daerah kabupaten/kota atas bagi hasil pajak provinsi yang belum ditransfer ke Kas Daerah Kabupaten/kota. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar SPD/SKO yang diterbitkan pemerintah provinsi yang belum dicairkan.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD merupakan piutang pinjaman pemerintah daerah kepada BUMN/D yang jatuh tempo dalam tahun berjalan.

Bagian lancar TP dan TGR merupakan tagihan pemerintah daerah kepada bendaharawan, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang jatuh tempo dalam tahun berjalan.

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel IV.2
Perkembangan Aset Lancar Provinsi Riau
Per Tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

Uraian	31 Des 2010	31 Des 2009
Kas di Kas Daerah	381.264.654.261,46	110.276.043.931,73
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.590.838.873,54	19.178.445.203,67
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	14.321.043.830,25	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	815.484.541,00	0,00
Piutang Pajak	7.219.908.431,00	10.496.123.881,00
Piutang Retribusi	1.721.404.563,00	2.278.746.385,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	646.941.700,00	1.503.760.900,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah*)	0,00	2.085.995.000,00
Piutang Lain-Lain	2.171.666.405,58	2.523.857.509,48
Persediaan	28.738.071.600,37	26.202.707.211,62
Jumlah	447.490.014.206,20	174.545.680.022,50

*) Direklasifikasi Ke Akun Aset Lainnya

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2010

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas yang di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

Kebijakan akuntansi untuk Kas di Bendahara Pengeluaran yaitu kas dicatat sebesar nilai nominal dan kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

Tabel IV.3
Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pada Pemerintah Provinsi Riau

No	Satuan Kerja	Alamat
1	Dinas Pendidikan	Jl. Cut Nyak Dien
2	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Jl. Jend. Sudirman No. 462
3	Dinas Kesehatan	Jl. Cut Nyak Dien
4	RSUD Arifin Achmad	Jl. Diponegoro No. 2
5	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Jl. H.R. Subrantas Panam
6	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Riau
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Gajah Mada
8	Dinas Perhubungan	Jl. Jend. Sudirman No. 474
9	Badan Lingkungan Hidup	Jl. Thamrin No. 93
10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jl. Pepaya No. (Kantor Dinas Koperasi dan UKM Lama)
11	Dinas Sosial	Jl. Jend. Sudirman No. 239
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	Jl. Jend. Sudirman No. 438
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jl. Pepaya No. 67
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	Jl. Gajah Mada No. 200
15	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Jl. Jendral Sudirman
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Jend. Sudirman No. 200
17	Dinas Pemuda dan olahraga	Jl. Dr. Sutomo No. 114
18	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Letkol Hasan Basri No. 04
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Jl. Cut Nyak Dien
20	Sekretariat Daerah	Jl. Jend. Sudirman No. 460
21	Sekretariat DPRD	Jl. Jend. Sudirman
22	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Diponegoro No. 24 A
23	Inspektorat	Jl. Cut Nyak Dien
24	Badan Penghubung	Jl. Otto Iskandardinata No. 107
25	Dinas Pendapatan	Jl. Jend. Sudirman No. 6
26	Badan Kepegawaian Daerah	Jl. Cut Nyak Dien No. Pekanbaru
27	Badan Ketahanan Pangan	Jl. Kuantan Raya No. 27

28	Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	Jl. H.R. Subrantas Panam
29	Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik	Jl. Jend. Sudirman No. 460
30	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jl. H.R. Subrantas No. 4 Panam
31	Dinas Perkebunan	Jl. Cut Nyak Dien
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jl. Patimura No. 2
33	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	Jl. Kaharuddin Nasution No. 339
34	Dinas Kehutanan	Jl. Jend. Sudirman No. 468
35	Dinas Pertambangan dan Energi	Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga
36	Dinas Perikanan dan Kelautan	Jl. Patimura No. 6
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Pepaya No. 63

Sumber : *BPS Riau*

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen yang dilakukan pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada BUMD, dan investasi permanen lainnya untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah daerah antara lain berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Tabel IV.4
Perkembangan Investasi Jangka Panjang
per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009

Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Investasi Jangka Panjang	913.478.004.136,02	899.465.063.646,75
Terdiri dari :		
Permanen	817.314.938.808,00	798.625.063.646,75
Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD	789.863.138.808,02	792.072.263.646,75
Investasi Permanen Lainnya	27.451.800.000,00	6.552.800.000,00
Nonpermanen :	96.163.065.328,00	100.840.000.000,00
Dana Bergulir-PMEK	152.806.133.400,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(137.278.469.435,00)	0,00
Dana Bergulir –PMEK	15.527.663.965,00	0,00
Non Permanen Lainnya	80.635.401.363,00	100.840.000.000,00

Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2010

1. Investasi Non Permanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah daerah antara lain berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada proyek Pembangunan dan investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak

dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan.

1) Dana Bergulir

Dana bergulir adalah berupa Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK). Dana ini diberikan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 dan 2002 kepada masyarakat atau kelompok masyarakat melalui Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pinjaman Modal (FKPPM) yang dibentuk oleh Gubernur Riau. FKPPM menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, dan ditagih kembali dari masyarakat dengan bunga 3% per tahun, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat (bergulir).

Kebijakan akuntansi untuk investasi dalam bentuk dana bergulir yaitu dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.

B. Permasalahan Akun-Akun yang Menjadi Paragraf Penjelasan

Identifikasi permasalahan yang terdapat dalam akun-akun yang menjadi paragraf penjelasan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan dilakukan berdasarkan empat kriteria kewajaran laporan

keuangan pemerintah daerah (BPK:2009), yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas pengendalian intern.

Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (*asersi management*) dalam informasi keuangan, efektifas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah 10.590.838.873,54 dan 19.178.445.203,67.

Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2010 sebesar 10.590.838.873,54 terdiri dari :

i. Sisa UP/TU/LS (UYHD) tahun 2010 : 9.341.744.511,54

ii. Sisa UYHD tahun 2007 dan 2008

Yang belum disetor ke Kas daerah : 547.431.733,00

iii. PFK di Bendahara Pengeluaran : 1.035.770.413,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar 19.178.445.203,67 terdiri dari :

i. UYHD tahun 2007 dan 2008 yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar 882.853.474,00;

ii. PFK Tahun 2009 sebesar 706.236.349,54;

iii. UYHD tahun 2009 sebesar 17.586.830.911,94; dan selisih bulatan 45,19,

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar 19.178.445.203,67 tersebut, selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar 18.628.489.002,48, terdiri dari UYHD tahun 2007/2008 sebesar 335.421.741 dan PFK/UYHD sebesar 18.293.067.261,48, sehingga sisa kas yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2010 hanya terdiri dari sisa UYHD tahun 2007/2008 sebesar 547.431.733,00.

Tabel IV.5
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2010 dan 2009

No	Satuan Kerja	UYHD 2010	UYHD 2009
1	Dinas Pendidikan	945.414.576,00	2.078.185.630,00
2	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	0,00	135.657.950,00
3	Dinas Kesehatan	483.527.214,00	2.190.688.398,00
4	RSUD Arifin Achmad	0,00	34.066.685,00
5	Rumah Sakit Jiwa Tampan	0,00	247.164.475,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	13.650.000,00	339.868.091,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	0,00	239.597.645,00
9	Badan Lingkungan Hidup	0,00	35.496.144,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
11	Dinas Sosial	2.911.500,00	865.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	0,00	276.172.280,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	0,00	2.524.603,00
15	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	62.349.416,00	94.274.307,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.025.237,00	50.801.450,00
17	Dinas Pemuda dan olahraga	795.568.579,00	1.020.462.715,94
18	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	232.193.872,00
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00
20	Sekretariat Daerah	5.895.967.070,00	5.489.481.790,54
21	Sekretariat DPRD	1.463.755.158,00	2.733.279.460,00
22	Badan Penelitian dan Pengembangan	18.140.796,00	0,00
23	Inspektorat	0,00	0,00

24	Badan Penghubung	0,00	0,00
25	Dinas Pendapatan	23.307.661,54	1.304.469.716,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	800,00	11.756.516,00
27	Badan Ketahanan Pangan	40.033.893,00	28.773.976,00
28	Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	0,00	1.205.516.945,00
29	Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik	190.395.184,00	195.267.469,00
30	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	79.177.163,00	158.393.756,00
31	Dinas Perkebunan	230.725.035,00	259.182.824,00
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	315.894.478,00	782.892.983,00
33	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	5.610.000,00	0,00
34	Dinas Kehutanan	0,00	8.160.000,00
35	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	0,00
36	Dinas Perikanan dan Kelautan	10.385.113,00	23.250.477,00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
	Bulatan		5,19
	Jumlah	10.590.838.873,54	19.178.445.203,67

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2010

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 31 Desember 2010 sebesar Rp7.402.425.038,00, mengalami kas tekor dari hasil pemeriksaan kas. Gubernur Riau dengan Keputusan Gubernur No. Kpts.710/VI/2011 dan No. Kpts.711/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 menetapkan pembebanan penggantian sementara kepada AJS dan NSD masing-masing sebesar Rp1.304.019.413,00 dan Rp4.634.650.467,00 atau seluruhnya berjumlah Rp5.938.669.880,00. Dengan adanya penetapan pembebanan sementara tersebut, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.938.669.880,00 direklasifikasi ke Aset Lainnya. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.463.755.158,00 belum ditetapkan pembebanan sementara. Selama periode Maret s.d. Mei 2011, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau telah menyetorkan ke Kas daerah sebesar Rp115.850.000,00 sehingga sisa UYHD Tahun 2010 yang belum disetor sebesar Rp1.347.792.910,00.

Keputusan Gubernur No. Kpts.710/VI/2011 dan No. Kpts.711/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 adalah keputusan yang menjelaskan tentang status dana di Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, kas tekor tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya AJS sebesar Rp1.304.019.413,00 dan menjadi tanggungjawab NSD sebesar Rp4.634.650.467,00 atau seluruhnya berjumlah Rp5.938.669.880,00 Untuk wajib di kembalikan ke Kas Daerah.

Data informasi tersebut harus diuji secara substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut dilakukan untuk menyakini *asersi* manajemen, yaitu : keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, serta penyajian dan pengungkapan.

a. Keberadaan dan Keterjadian

Data menunjukan bahwa ternyata pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran yang dalam hal ini sebagai akun yang menjadi paragraf penjelasan mengalami ketidaksesuaian terhadap asersi manajemen yaitu keberadaan dan keterjadian.

Akun Kas di Bendahara Pengeluaran tidak menyajikan nilai keberadaannya dan tidak didukung bukti-bukti yang memadai. Yaitu dibuktikan dengan nilai Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 31 Desember 2010 yang mengalami kas tekor sebesar Rp7.402.425.038,00, dan dana sebesar Rp1.463.755.158,00 diantaranya belum ditetapkan pembebanan sementara.

b. Kelengkapan

Akun Kas di Bendahara Pengeluaran tidak menyajikan nilai secara lengkap, karna pada tanggal pemeriksaan keuangan tidak ditemukan dana sebesar Rp7.402.425.038,00. hal ini merugikan bagi daerah karna sebagian aset mengalami penurunan nilai atau tekor.

c. Hak dan Kewajiban

Akun Kas di Bendahara Pengeluaran tidak menyajikan secara benar berapa hak dan kewajiban Pemerintah yang sesungguhnya, dengan nilai Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 31 Desember 2010 yang mengalami kas tekor sebesar Rp7.402.425.038,00, dan dana sebesar Rp1.463.755.158,00 diantaranya belum ditetapkan pembebanan sementara. Sehingga pemerintah daerah tidak mengetahui jumlah nilai hak nya.

d. Penilaian dan Alokasi

Dari data yang dijelaskan menunjukkan bahwa nilai aset, khususnya nilai Kas di Bendahara Pengeluaran tidak diklasifikasikan dan dialokasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga mengalami pengurangan nilai/kas tekor.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 31 Desember 2010 yang mengalami kas tekor sebesar Rp7.402.425.038,00, dan dana sebesar Rp1.463.755.158,00 diantaranya belum ditetapkan pembebanan sementara. Permasalahan ini menggambarkan bahwa komponen Laporan

Keuangan yaitu Neraca (Kas di Bendahara Pengeluaran) tidak disajikan sesuai dengan ketentuan dan tidak diungkapkan secara memadai.

2) Dana Bergulir

Pemerintah Provinsi Riau mencatat investasi dana bergulir berupa Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) yang digulirkan tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp152.806.133.400,00 dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp137.278.469.435,00 sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah sebesar Rp15.527.663.965,00. Dalam menentukan nilai yang dapat direalisasikan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menggunakan data PT Bank Riau Kepri atas jumlah dana yang telah dikembalikan kelompok masyarakat per 31 Desember 2010 sebagai estimasi terbaik ketertagihan dana bergulir tersebut, bukan berdasarkan data penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir untuk menentukan dana bergulir yang benar-benar tidak dapat tertagih, diragukan tertagih, dan dapat ditagih.

Tabel IV.6
Neraca Pemerintah Provinsi Riau

Uraian	31 Des 2010	31 Des 2009
Dana Bergulir – PMEK	152.806.133.400,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(137.278.469.435,00)	0,00
Dana Bergulir Neto	15.527.663.965,00	0,00

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010

Dana Bergulir berupa Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar

Rp152.527.663.965,00 dan Rp 0,00 adalah dana yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 dan 2002 kepada masyarakat atau kelompok masyarakat melalui Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pinjaman Modal (FKPPM) yang dibentuk oleh Gubernur Riau. FKPPM menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan bunga 3% per tahun, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat (bergulir).

Dana PMEK yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2001 dan 2002 masing-masing sebesar Rp52.806.133.400,00 dan Rp100.000.000.000,00.

Dari dana tahun 2001 sebesar Rp52.806.133.400,00, hanya sebesar Rp52.217.512.921 disalurkan FKPPM ke masyarakat sedangkan sisa dana *idle* sebesar Rp588.620.479,00 masih tersimpan di rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (P3M) di PT Bank Riau Kepri.

Dana PMEK sebesar Rp100.000.000.000,00 disalurkan melalui PT Bank Riau Kepri sebesar Rp99.000.000.000,00 dan 4 BPR sebesar Rp1.000.000.000,00.

Rincian dana PMEK menurut data PT Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

- a. PMEK tahun 2001 sebesar Rp52.806.133.400,00.

Tabel IV.7
Rincian Dana PMEK Tahun 2001
Menurut Data Dari PT Bank Riau Kepri

SKPD Pengelola	Jumlah
1. Dinas Pertanian	9.952.660.000,00
2. Dinas Peternakan	9.335.000.000,00
3. Dinas Perikanan dan Kelautan	14.105.699.900,00
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.129.440.500,00
5. Dinas Perkebunan	16.833.333.000,00
6. Dinas Koperasi dan UKM	750.000.000,00
7. BPPM	700.000.000,00
Jumlah	52.806.133.400,00

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010

- b. PMEK di 7 SKPD, 15 BMT dan 4 BPR Tahun 2002 sebesar
Rp100.000.000.000,00

Tabel IV.8
Rincian Dana PMEK Tahun 2002
Menurut Data Dari PT Bank Riau Kepri

Bank/SKPD/Unit Pengelola	Jumlah
PT. Bank Riau Kepri :	
1. Dinas Pertanian	26.460.000.000,00
2. Dinas Peternakan	11.270.000.000,00
3. Dinas Perikanan dan Kelautan	17.640.000.000,00
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.840.000.000,00
5. Dinas Perkebunan	29.400.000.000,00
6. Dinas Koperasi dan UKM	4.900.000.000,00
7. BPPM	490.000.000,00
8. 15 Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang tersebar di Kabupaten/kota	1.000.000.000
Sub Jumlah	99.000.000.000,00
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) :	
1. BPR Sari Madu, Bangkinang	250.000.000,00
2. BPR Indra Arta, Rengat	250.000.000,00
3. BPR Cempaka Wahana Sejahtera, Bagan Batu	250.000.000,00
4. BPR Gemilang, Tembilahan	250.000.000,00
Sub Jumlah	1.000.000.000,00
Jumlah	100.000.000.000,00

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010

Berdasarkan data PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2010, jumlah dana yang telah dikembalikan kelompok masyarakat penerima PMEK hanya sebesar Rp15.527.663.965,00. Pemerintah Provinsi Riau menyatakan nilai yang telah tertagih tersebut merupakan estimasi terbaik yang dapat diperkirakan berdasarkan data dan informasi yang ada saat ini. Estimasi ketertagihan Dana Bergulir tersebut akan disesuaikan nilainya setiap tahun.

Kebijakan akuntansi dana bergulir yaitu dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dilakukan secara prospektif, oleh karena itu tidak terdapat penyajian kembali untuk tahun sebelumnya yaitu tahun 2009.

Dalam menentukan nilai yang dapat direalisasikan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menggunakan data PT Bank Riau Kepri atas jumlah dana yang telah dikembalikan kelompok masyarakat per 31 Desember 2010 sebagai estimasi terbaik ketertagihan dana bergulir tersebut, bukan berdasarkan data penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir untuk menentukan dana bergulir yang benar-benar tidak dapat tertagih, diragukan tertagih, dan dapat ditagih.

Padahal seharusnya Pemerintah Provinsi Riau harus menggunakan data penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir dalam menentukan nilai bersih yang dapat ditentukan (*net realizable value*).

Data informasi tersebut harus diuji secara substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut dilakukan untuk menyakini asersi manajemen, yaitu : keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, serta penyajian dan pengungkapan.

a. Keberadaan dan Keterjadian

Dana bergulir berupa Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) tidak memuat informasi keberadaan sesungguhnya, karna

perhitungannya tidak didasarkan dari data penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir dalam menentukan nilai bersih yang dapat ditentukan (*net realizable value*).

b. Kelengkapan

Karna perhitungan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) menggunakan data PT Bank Riau Kepri atas jumlah dana yang telah dikembalikan kelompok masyarakat per 31 Desember 2010 sebagai estimasi terbaik ketertagihan dana bergulir tersebut, bisa memungkinkan ketidaklengkapan dalam menentukan nilai saldo di penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir karna ketidakcocokan data yang dimiliki.

c. Hak dan Kewajiban

Pemerintah Provinsi Riau tidak dapat menentukan secara pasti nilai hak yang dapat dimiliki dari setiap aset yang dalam hal ini adalah jumlah nilai dana bergulir, jika pencatatan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) tidak dari penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir.

d. Penilaian dan Alokasi

Seharusnya seluruh aset yang dalam hal ini adalah dana bergulir disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya sesuai dengan data dari penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir bukan menggunakan data PT Bank Riau Kepri.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) tidak disajikan dengan ketentuannya dan tidak diungkapkan secara memadai yaitu menggunakan data PT Bank Riau Kepri bukan menggunakan data dari penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menarik suatu kesimpulan. Selanjutnya dari beranekaragam kenyataan yang ditemui peneliti sepanjang analisa dalam kasus ini, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat diperlukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau guna menjadi bahan referensi atau tambahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

A. Kesimpulan

1. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun 2010. BPK menilai laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2010 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau per tanggal 31 Desember 2010, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun akun-akun yang menjadi paragraf penjelasan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 adalah komponen dari Neraca. Akun-akun tersebut meliputi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran (Aset Lancar) dan Akun Dana Bergulir (Investasi Jangka Panjang).

2. Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam akun-akun yang menjadi paragraf penjelasan adalah sebagai berikut:
 - a. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.463.755.158,00 belum ditetapkan Pembebanan sementara oleh Gubernur Pemerintah Provinsi Riau.
 - b. Penyajian Dana Bergulir Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) sebesar Rp15.527.663.965,00 yang merupakan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) belum sepenuhnya didasarkan atas estimasi ketertagihan dari penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Gubernur Riau memberikan teguran keras secara tertulis kepada Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas pada sekretariat DPRD untuk mempertanggungjawabkan kekurangan dana sebesar Rp1.463.755.158,00 untuk dikembalikan ke kas Daerah. Selanjutnya Gubernur Riau mengintruksikan untuk mengfungsikan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) yaitu menagih dan menuntut sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) sampai dengan tahun 2010 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dan Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti rugi (MPTGR) mengeluarkan Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SKPJM) guna memastikan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab dan mengembalikan UYHD ke Kas Daerah.

2. Sebaiknya Gubernur Riau mewajibkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menginventarisir, seluruh aset yang dimiliki secara sistematis guna mempermudah untuk mengetahui keadaan nilai yang sebenarnya. Setiap Penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir merapikan dan menyesuaikan data dengan data PT Bank Riau Kepri atas jumlah dana yang telah dikembalikan kelompok masyarakat per 31 Desember 2010 dengan melaksanakan rekonsiliasi dengan PT Bank Riau Kepri. Sehingga penentuan nilai bersih yang dapat ditentukan (*net realizable value*) dapat ditentukan dengan data penatausahaan satuan kerja pengelola dana bergulir setelah rekonsiliasi.

C. Keterbatasan

Hasil penelitian ini tentunya mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Berikut beberapa sebab keterbatasan yang dialami peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya menggunakan referensi utama Buku 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 yaitu tentang Laporan Keuangan. Sedang Buku II tentang Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Buku III tentang Sistem Pengendalian Intern tidak peneliti peroleh dari sumber yang terkait.

2. Penelitian ini hanya membahas tentang akun-akun yang menjadi paragraf penjelasan dan sebab akun-akun tersebut menjadi paragraf penjelasan secara umum tidak secara totalitas sesuai yang diharapkan karna keterbatasan data yang diperoleh dan hal tersebut dianggap menjadi kerahasiaan terkait kode etik BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
3. Karna keterbatasan waktu dan dana maka penelitian ini tidak melibatkan pihak yang bertanggungjawab terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau sebagai nara sumber tetapi hanya melibatkan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau sebagai pemeriksa laporan keuangan tersebut. Sehingga tidak mengetahui informasi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim Tajwid dan Terjemahannya Surat Al- Baqarah Ayat 282.
- Arif, Bahtiar, Muchlis Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2009. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009*. Jakarta. Diakses 15 Desember 2011, pukul 14.00 Wib.<<http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2009i/IHPS/IHPS.pdf>>.
- Bastian, Indra. 2003. *Audit Sektor Publik Edisi Pertama*. Visi Global Media: Jakarta.
- Belkoui, Ahmad Riahi. 2002. *Teori akuntansi*. Erlangga: Jakarta.
- Bowo. 2009. Hasil Audit BPK. Diakses 27 April 2010 jam 8;08 PM. <<http://www.ahmadheryawan.com/component/content/article/94-kolom/3363-hasil-audit-bpk.pdf>>
- Boyton, Jhonson, Kell. 2002. *Modern Auditing Jilid 1*. Erlangga: Jakarta.
- Chan, James L. 2003. *Government Accounting: An Assessment of Theory, Purposes and Standards*. Public Money And Management January 2003.
- Fitria Sari, Vita Dkk. 2010. *Studi Eksploratif Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian Menggunakan Content Analysis*. Simposium Nasional XIII. Purwokerto.
- Hapsari, Andhisa Setya. 2008. *Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Auditan BPK (Refleksi, Eksistensi dan Peranan BPK)*. Diakses 15 Desember 2011, Pukul 13.45 Wib.
http://assassinisborn.multiply.com/journal/item/3/TINJAUAN_KEBERM_ANFAATAN_LAPORAN_KEUANGAN_AUDITAN_BPK.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2005. *Teori Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Professional Akuntan Publik Per 1 Januari 2001*. Salemba Empat: Jakarta.
- Indranata, Iskandar. 2006. *Terampil dan Sukses Melakukan Audit Mutu Internal Berdasarkan ISO 9001:2000*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2008. *Surat Keputusan Ketua Umum Institute Akuntan Publik Indonesia*. Jakarta.

- Jihong, Liu. 2007. *The Study On Princing: new evidence From china*. Journal Service, Economics And Manajement, Vol 1 No. 1.
- Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury. 2000. *Public Sector Accounting 5th edition*. Prentice Hall.
- Kieso, Donald E. 2002. *Akuntansi Intermediate*. Erlangga: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Erlangga: Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- M. Guy, Dan. C. Wayne Alderman Dan Alan J. Winters. 2002. *Auditing*. Jilid Satu, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku Satu, Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Narbuko, Cholid. 2009. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nasution. 2011. *Metode Research*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Obaidat, Ahmad N. 2007. *Accounting Information Qualitative Characteristic Gap: Evidence from Jordan*. *International Management Review Vol.3 No.2 2007*. Diakses 15 desember 2011 Pukul 13.49 Wib <<http://www.usimr.org/IMR-2-2007/v3n207-art3.pdf>>
- O. Gill Dan Motra Chatton. 2008. *Memahami Laporan Keuangan*, Penerbit PPM: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rahimsyah, M.B. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Aprindo: Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Fokusmedia.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Riyanti, Umi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan*. Skripsi, Program S-1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saidin, Saidatur Fauzi. 2007. *Audit Committee Characteristics and Quality of Unaudited Financial Accounts*. Diakses 19 desember 2011 pukul, 14.05 Wib.
http://eprints.usm.my/7837/1/AUDIT_COMMITTEE_CHARACTERISTICS_AND_QUALITY_OF_UNAUDITED_FINANCIAL_ACCOUNTS.pdf

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Salemba Empat: Jakarta.

Simunic. 2000. *Ligation risk, audit fees and audit quality (on-line)*. Available at <http://www.google.com>

Tanjung, Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Aksara: Jakarta.

Widjaja, Amin. 1994. *Auditing Suatu Pengantar*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta

Widjaja, Amin. 2008. *Dasar-dasar Audit Opersional*. Penerbit Harvarinto.